**PENGARUH DAU, PAD, JENIS DAN LETAK PEMERINTAHAN TERHADAP
PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN
DI KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGGARA**

Yusuf Jaya Saputra

Program Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari

Email: yusufjayasaputra@yahoo.co.id

Rosnawintang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

Email: nanarosnawintang@gmail.com

Nasrullah Dali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

Email: nasrullahdali19@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh DAU, PAD dan Jenis dan Letak Pemerintahan dan Pinjaman Daerah pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data sekunder runtut waktu (time series) dari tahun 2011-2016 yang bersumber dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Tenggara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 – 2016 dan situs Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementerian Keuangan. Untuk analisis digunakan alat analisis regresi data panel dan diolah menggunakan E-Views 10. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel DAU dan PAD berpengaruh positif pada perilaku oportunistik penyusun anggaran, variabel JENIS DAN LETAK memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga berpengaruh negatif terhadap OPA.

Kata Kunci: *Anggaran, Legislatif, Perilaku Oportunistik.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the influence of DAU, PAD and the Types and Locations of Government and Regional Loans on the Opportunistic Behavior of Budget Compilers in Regencies / Cities in Southeast Sulawesi. The type of data in this study consists of time series of secondary data sources from 2011-2016 sourced from the Southeast Sulawesi Regional Secretariat Financial Bureau, Central Sulawesi Statistics Agency (BPS), Southeast Sulawesi Regional Economic and Financial Study Office Representative of Bank Indonesia, Southeast Sulawesi Province in 2011-2016 and the website of the Directorate General of Regional Finance, Ministry of Finance. For the analysis, panel data regression analysis tools are used and processed using E-Views 10. Hypothesis testing results indicate that the DAU and PAD variables have a positive effect on the opportunistic behavior of the budget compilers, the TYPE AND LAY variables have insignificant influence and also have a negative effect on the OPA.

Keywords: *Budget, Legislature, Opportunistic Behavior.*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan pada penyusunan anggaran timbul ketika pihak – pihak yang terlibat berupaya untuk memanfaatkan peluang agar kepentingan pribadi dan kelompoknya dapat diakomodir dalam APBD (Raghuhandan et al., 2012; Suryarini, 2012; Radebe and Radebe, 2014). Kebijakan anggaran menjadi ajang perebutan kepentingan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, legislatif, partai politik, pengusaha, organisasi masyarakat, maupun rakyat kecil (Sujaie, 2013). Berbagai modus perilaku oportunistik yang sering terjadi seperti menetapkan alokasi anggaran yang dimodifikasi untuk memenuhi kepentingan politik dan kepentingan individu, memasukkan usulan proyek-proyek besar yang menguntungkan salah satu pihak dalam perencanaan anggaran, serta sikap cenderung

lebih memperjuangkan realisasi penetapan anggaran atas proyek-proyek yang mudah dikorupsi dengan harapan mendapatkan kompensasi fee project yang cukup besar (Jumaidi, 2014).

Penelitian Sujaie (2013) menunjukkan bahwa praktek perilaku oportunistik eksekutif dalam kebijakan anggaran terjadi karena dua faktor pendorong: Pertama, anggapan bahwa eksekutif merupakan pelaksana semua fungsi pemerintah daerah yang telah berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama; dan Kedua, eksekutif mempunyai akses informasi yang besar dalam konteks penyusunan anggaran. Sedangkan perilaku oportunistik legislatif didorong oleh adanya keunggulan kekuasaan (discretionary power) dalam konteks memutuskan anggaran. Faktor inilah yang mendorong legislatif untuk melakukan; Pertama, berusaha memengaruhi eksekutif untuk memaksimumkan anggaran pada program-program tertentu yang dapat memuluskan jalan bagi seorang legislator untuk dapat terpilih kembali dalam pemilu berikutnya; Kedua, mendorong eksekutif untuk mengajukan anggaran yang dapat dengan mudah diserap oleh konstituennya dan tidak melalui prosedur birokrasi yang rumit.

Fenomena perilaku penyusun anggaran sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena meskipun aturan formal tentang mekanisme penyusunan APBD telah dirancang sedemikian rupa, namun pada prakteknya masih terjadi beberapa penyimpangan. Meningkatnya kasus korupsi merupakan salah satu indikasi terjadinya perilaku oportunistik yang dilakukan penyusun anggaran (Mauro, 1998). Sejalan dengan hal tersebut, Sujaie (2013) menegaskan bahwa peningkatan belanja hibah dan bantuan sosial juga menunjukkan telah terjadi perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Sepanjang tahun 2015 sebanyak 57 kasus korupsi di Sulawesi Tenggara yang terdeteksi melalui pencarian media online, media cetak dan lain-lain. Adapun daerah yang paling banyak melakukan tindakan korupsi yakni Kabupaten Muna, Kota Kendari, Kolaka Utara, Disusul dengan Kabupaten Konawe Selatan, Bombana dan Kolaka. Daerah yang paling tinggi nilai nominal uang yang di korupsi di Sulawesi Tenggara yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan, Kota Baubau, Bombana, dan Muna.

Penelitian sebelumnya (Abdullah dan Asmara, 2006; Abdullah, 2012; Oktriniatmaja, 2011; Suryarini, 2012; Sularso dkk., 2014) menunjukkan bahwa DAU, PAD dan SiLPA berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Penelitian tentang perilaku oportunistik penyusun anggaran sebelumnya, lebih fokus pada perilaku legislatif yang cenderung mempengaruhi alokasi anggaran untuk kepentingan politik dengan meningkatkan anggaran untuk belanja infrastruktur dan belanja DPRD. Namun mengamati fenomena yang terjadi terkait proses penyusunan APBD yang merupakan proses bersama antara legislatif dan eksekutif, peneliti tertarik untuk meneliti perilaku oportunistik yang terjadi akibat interaksi antara kedua pihak yang didasari adanya hubungan keagenan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan berbagai fenomena serta kesenjangan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik penelitian dengan judul “Pengaruh DAU, PAD, Jenis dan Letak Pemerintahan Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh DAU, PAD dan Letak Pemerintahan terhadap perilaku oportunistik.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori agensi dalam konteks pemerintahan, dipandang dalam perspektif bahwa pemerintah daerah adalah *agent* bagi publik atau masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat atau publik diposisikan sebagai *principal*. Pelaksanaan berbagai tugas pemerintah merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan legitimasi dari publik, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara *agent* (pemerintah) yang

mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya informasi yang asimetri inilah yang menjadikan para *agent* berlaku oportunis atas peluang yang ada dan dapat mengarah pada terjadinya kecurangan (*fraud*) serta penyelewengan.

Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori keagenan yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Principal* memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan *agent* memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya.

Implikasi teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari perspektif hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah *agent* dan legislatif adalah *principal* (Halim dan Abdullah, 2006). Apabila dilihat dari perspektif hubungan keagenan legislatif dengan rakyat, pihak legislatif adalah *agent* yang membela kepentingan rakyat (*principal*), akan tetapi tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam pendelegasian kewenangan rakyat terhadap legislatif. Hal inilah yang seringkali menyebabkan adanya distorsi anggaran yang disusun oleh legislatif sehingga anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat, melainkan cenderung mengutamakan self-interest para pihak legislatif tersebut. Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan anggaran yang disahkan adalah alat untuk melancarkan aksi pencurian hak rakyat atau sering dikenal dengan istilah korupsi (Mauro, 1998; Keefer and Khemani, 2003).

Hubungan keagenan di pemerintahan antara legislatif dan eksekutif menunjukkan posisi legislatif sebagai *principal* dan eksekutif adalah *agen* (Halim dan Abdullah, 2006; Latifah, 2010; Abdullah, 2012). Hubungan antara *principal* dan *agen* senantiasa menimbulkan masalah keagenan yang disebut *agency problems* (Lupia and McCubbins, 2000). Johnson (1994) dalam Abdullah dan Asmara (2006) menyebut hubungan eksekutif atau birokrasi dengan legislatif atau kongres dengan nama self-interest model. Dalam hal ini, *legislators* ingin dipilih kembali, birokrat ingin memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimumkan utilitasnya. Agar terpilih kembali, *legislators* mencari program dan proyek yang membuatnya populer di mata konstituen. Birokrat mengusulkan program-program baru karena ingin *agency*-nya berkembang dan konstituen percaya bahwa mereka menerima manfaat dari pemerintah tanpa harus membayar biayanya secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa baik eksekutif maupun legislatif berupaya untuk memaksimalkan dan memanfaatkan perannya dalam penyusunan anggaran demi memperoleh keuntungan individual maupun kepentingan kelompok yang cenderung akan menimbulkan kerugian bagi rakyat.

Lupia and McCubbins (2000) menyatakan bahwa warganegara adalah *principal* yang menunjuk perwakilannya untuk melayani mereka sebagai *agen* di parlemen, sementara Andvig et al. (2001) menyebutkan voters adalah *principal* dari parlemen. Dalam hal pembuatan kebijakan, Hagen (2002) berpendapat bahwa hubungan *principal*-*agen* yang terjadi antara pemilih (voters) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi *principal* atau pemilihnya. Pada kenyataannya legislatif sebagai *agen* bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik (Abdullah dan Asmara, 2006).

Studi Abdullah (2012) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Abdullah (2012) menemukan bahwa power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Penelitian Sularso dkk. (2014) serta Abdullah dan Asmara (2006) menunjukkan bahwa semakin besar PAD maka perilaku oportunistik penyusunan anggaran akan semakin besar.

Tujuan dari dana alokasi umum adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah. Penerimaan DAU membuka ruang bagi legislatif untuk memaksimalkan utilitasnya dengan merekomendasikan eksekutif agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan atau proyek-proyek yang menguntungkan legislatif (Abdullah, 2012). Transfer dari pemerintah pusat memiliki keterkaitan sangat erat dengan belanja pemerintah daerah. Oktriniatmaja (2011) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap peningkatan alokasi belanja modal.

Kecenderungan perilaku oportunistik yang dilakukan politisi pada level pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pada sisi pendapatan, karena pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari dana transfer pemerintah pusat (Bartolini and Santolini, 2007). Lebih lanjut disebutkan bahwa kondisi ini menyebabkan perilaku oportunistik yang dilakukan politisi hanya dapat memengaruhi sisi belanja dalam APBD. DAU yang diterima daerah dapat mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dalam APBD (Maryono, 2013).

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk pelayanan publik yang paling mendasar, namun jenis belanja tersebut tidak dapat memberikan peluang untuk korupsi, sehingga anggaran pendidikan, kesehatan, dan sosial akan diperkecil (Mauro, 1998). Studi Mauro (1998) menunjukkan bahwa jenis-jenis belanja pemerintah berupa belanja barang atau pelayanan untuk program-program dan kegiatan yang sulit untuk dimonitor orang lain, membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik. Hasil penelitian ini dikuatkan oleh Tanzi and Davoodi (2002) yang mengemukakan bahwa belanja investasi publik lebih disukai karena dapat memberikan komisi lebih besar daripada belanja untuk pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Jenis dan Letak Pemerintahan dapat di samakan sebagai status daerah, dimana pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan antar daerah. Perbedaan ini dapat berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula (Abdullah, 2004).

Kerangka Konsep Dan Hipotesis

Kerangka konsep variabel penelitian dibuat berdasarkan hasil penggabungan variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah DAU, PAD dan Jenis dan Letak Pemerintahan. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Sehingga dapat digambarkan kerangka konsep variabel penelitian sebagai berikut:

Gambar 1
 Kerangka Konsep Penelitian

Tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah. Penerimaan DAU membuka ruang bagi legislatif untuk memaksimalkan utilitasnya dengan merekomendasikan eksekutif agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan atau proyek-proyek yang menguntungkan legislatif (Abdullah, 2012). Transfer dari pemerintah pusat memiliki keterkaitan sangat erat dengan belanja pemerintah daerah. Oktriniatmaja (2011) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap peningkatan alokasi belanja modal. Kecenderungan perilaku oportunistik yang dilakukan politisi pada level pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pada sisi pendapatan, karena pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari dana transfer pemerintah pusat (Bartolini and Santolini, 2007). Lebih lanjut disebutkan bahwa kondisi ini menyebabkan perilaku oportunistik yang dilakukan politisi hanya dapat memengaruhi sisi belanja dalam APBD. DAU yang diterima daerah dapat mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dalam APBD (Maryono, 2013). Berdasarkan kajian empiris di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1** : Terdapat pengaruh positif signifikan DAU terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran
- H2** : Terdapat pengaruh positif signifikan PAD terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.
- H3** : Terdapat pengaruh positif signifikan Letak Pemerintahan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan Penelitian kuantitatif. Penelitian berlangsung pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara untuk menganalisis data APBD pada kurun waktu 2011 – 2016.

Definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja OPA di dalam penelitian ini menggunakan anggaran biaya tak langsung yang dialokasikan dari APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yaitu: $\text{Spread} = \text{APBD tahun berjalan (t)} - \text{APBD tahun sebelumnya (t-1)}$. Nilai OPA menunjukkan adanya perilaku penyusun anggaran yang memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk mempengaruhi kebijakan pengalokasian anggaran sesuai dengan preferensi diri atau kelompoknya, sehingga nilai OPA menggambarkan besaran self-interest penyusun anggaran (Abdullah, 2012).
2. Pengukuran DAU dengan menggunakan spread Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Sularso dkk., 2014).
3. Pengukuran PAD menggunakan spread PAD (ΔPAD) adalah perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Abdullah, 2012). $\text{PAD} = \text{PAD APBD (t)} - \text{APBD (t-1)}$
4. Jenis dan Letak Pemerintahan diukur dengan menggunakan skor. Jika status daerah adalah Kabupaten, diberi kode 1 (satu) dan jika status daerah adalah Kota, diberikan kode 2 (dua). Variabel ini digunakan dalam penelitian Abdullah, (2004) dan Retnoningsih (2009).

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (*time series*). Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukannya:

1. *Chow test* atau *Likelihood test*
2. *Hausman test*
3. *Langrange Multiplier (LM)*

Analisis Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R-Squares* dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen ataukah tidak. Cara untuk menguji yaitu dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dan nilai t-sig dengan $\alpha: 0,05$. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $t-sig < \alpha: 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel X terhadap variabel Y. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai t-sig dengan $\alpha: 0,05$. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $t-sig < \alpha: 0,05$, maka diterima H_1 atau tolak H_0 . Sebaliknya, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $t-sig > \alpha: 0,05$ maka tolak H_1 atau terima H_0 .

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengujian menggunakan *Common Effect Models* (CEM)

Dalam pendekatan estimasi *Common Effect Models*, *intersep* dan *slope* adalah tetap sepanjang waktu dan individu, adanya perbedaan *intersep* dan *slope* diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan (error atau residual), hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Estimasi *Common Effect Models* (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.378115	0.475290	-2.899523	0.0050
DAU?	1.076547	0.081339	13.23532	0.0000
PAD?	0.662602	0.350953	1.888006	0.0634
LETAK?	-0.262280	0.303672	-0.863695	0.3908
R-squared	0.813097	Mean dependent var		3.677887
Adjusted R-squared	0.801939	S.D. dependent var		1.541389
S.E. of regression	0.685981	Akaike info criterion		2.150981
Sum squared resid	31.52815	Schwarz criterion		2.309082
Log likelihood	-72.43530	Hannan-Quinn criter.		2.213921
F-statistic	72.86887	Durbin-Watson stat		1.083983
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1, nilai koefisien pada variabel DAU sebesar 1,076547, variabel PAD sebesar 0,662602, dan variabel Letak pemerintahan sebesar -0,262280. Sementara untuk nilai probabilitas variabel DAU sebesar 0,0000, variabel PAD sebesar 0,0634 dan variabel Letak pemerintahan sebesar 0,3908. Nilai probabilitas $< 0,05$ menunjukkan bahwa hanya variabel variabel DAU berpengaruh signifikan.

2. Pengujian menggunakan *Fixed Effect Models* (FEM)

Dari hasil pengolahan Program E-views sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Estimasi *Fixed Effect Models* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.600826	0.714836	0.840508	0.4042
DAU?	0.731482	0.085852	8.520295	0.0000
PAD?	0.745673	0.367159	2.030929	0.0470
LETAK?	-0.494863	0.602349	-0.821555	0.4148
R-squared	0.917364	Mean dependent var		3.677887
Adjusted R-squared	0.895230	S.D. dependent var		1.541389
S.E. of regression	0.498921	Akaike info criterion		1.640391
F-statistic	41.44486	Durbin-Watson stat		1.256079
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Models* (FEM) diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitasiap individu yang menunjukkan terdapat variabel signifikan yaitu variabel DAU dan PAD. Sedangkan Letak Pemerintahan tidak signifikan. Nilai Adjusted R-squared menunjukkan angka sebesar0,895230 dan nilai F-statistik sebesar 41.44486. Sedangkan nilai Probabilitas F-statistik sebesar 0,000000 yang memberikan arti bahwa model ini memiliki nilai signifikan.

3. Pengujian menggunakan *Random Effect Models* (REM)

Dalam pendekatan penelitian ini, dengan data panel didasarkan adanya perbedaan intersep dan slope sebagai akibat adanya perbedaan antar individu.

Tabel 3
Hasil Estimasi *Random Effect Models* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.749388	0.433007	-1.730660	0.0881
DAU?	0.944829	0.070125	13.47348	0.0000
PAD?	0.724984	0.302899	2.393483	0.0195
LETAK?	-0.243831	0.291573	-0.836259	0.4060
R-squared	0.755082	Mean dependent var		2.407868
Adjusted R-squared	0.740460	S.D. dependent var		1.168114
S.E. of regression	0.595097	Sum squared resid		23.72739
F-statistic	51.64017	Durbin-Watson stat		1.064421
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan pendekatan *RandomEffect Models* (REM), dimana diperoleh nilai probabilitas variabel DAU sebesar 0,0000 dan variabel PAD sebesar 0,0195, dimana probabilitas kedua variabel tersebut < 0,05, artinya kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap opportunistik penyusun anggaran (OPA). Sementara variabel Letak pemerintahan merupakan variabel yang tidak berpengaruh signifikan, dimana nilai probabilitas

0,4060 > 0,05. Sementara untuk nilai *Adjusted R-squared* menunjukkan nilai sebesar 0,740460 dan nilai F-statistik sebesar 51,64017. Sedangkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000 yang memberikan arti bahwa model ini memiliki nilai signifikan.

Penentuan Teknik Analisis Model data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara CEM dan FEM. Uji ini dilakukan setelah mengestimasi model CEM. Untuk lebih jelasnya hasil olah data uji chow dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.423528	(11,56)	0.0000
Cross-section Chi-square	58.762459	11	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2019

Dari hasil tabel 5 nilai yang dihasilkan dalam distribusi statistik terhadap *chi square* berdasarkan hasil hitung dengan menggunakan E-views adalah sebesar 58,762459 dengan probabilitas yang dihasilkan 0,0000 yaitu menyatakan signifikan karena < 0,05, sehingga statistik yang terjadi menerima H1 dan menolak H0, dimana dalam hal ini pemilihan model yang tepat untuk digunakan yaitu model *fixed effects*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model FEM dan REM. Uji ini dilakukan setelah dilakukan uji Chow dan terpilih model FEM. Untuk lebih jelasnya hasil olah data uji chow dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.320633	4	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai *chi-squares* sebesar 32,320633. Sedangkan nilai probabilitasnya 0,0000 > 0,05, artinya dalam hal ini H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga untuk pemilihan model yang akan tepat untuk digunakan pada penelitian ini yaitu model *Fixed Effect Models* (FEM).

Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan nilai probability Jarque-Bera dengan nilai alpha 5%. Jika nilai probability Jarque-Bera lebih besar dari nilai alpha 5%, maka data berdistribusi normal.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini telah terdistribusi dengan normal, dimana nilai probability Jarque –Bera nya sebesar $0,159194 > 0,05$.

2. Heterokedasitas

Uji heterokedasitas dilakukan dengan membandingkan nilai probability Likelihood ratio dengan nilai alpha 5%. Jika nilai probability Likelihood ratio lebih besar dari nilai alpha 5%, maka tidak mengandung gejala heterokedasitas.

Tabel 6
Uji Heterokedasitas

	Value	Df	Probability
Likelihood ratio	4.746977	12	0.9659

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 8 di atas, menunjukkan nilai probability Likelihood sebesar $0,9659 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Koefisien Determinasi (R-Squared)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan nilai R-Squared sebesar 0,9174 dan nilai Adjusted R-square sebesar 0,8952. Artinya, variabel OPA mampu dijelaskan oleh variabel DAU, PAD dan Letak pemerintahan sebesar 89,52%, dan sisanya sebesar 10,48% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Analisis Regresi Fixed Effect Models (FEM)

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, maka model yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah “**Model Regresi Fixed Effect Models (FEM)**”. Dari hasil estimasi regresi data panel dengan *Fixed Effect Models* (FEM) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Regresi Model FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.600826	0.714836	0.840508	0.4042
DAU?	0.731482	0.085852	8.520295	0.0000
PAD?	0.745673	0.367159	2.030929	0.0470
LETAK?	-0.494863	0.602349	-0.821555	0.4148

Sumber: Data Diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 7, maka dapat dilakukan Uji Hipotesis (Uji t) pada masing-masing variabel bebas terhadap perilaku oportunistik sebagai berikut

1. Variabel DAU

Dari hasil estimasi, di dapatkan nilai t-hitung sebesar 8,520295 dan jika dilihat dari besarnya nilai probabilitas DAU yaitu 0,0000 sehingga probabilitas DAU lebih kecil dari nilai *alpha* 5% ($0,0000 < 0,05$) maka disimpulkan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh yang signifikan dan juga berpengaruh positif terhadap OPA yang di tunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,731482.

2. Variable PAD

Dari hasil estimasi, di dapatkan nilai t-hitung sebesar 2,030929 dan jika dilihat dari besarnya nilai probabilitas PAD yaitu 0,0470 sehingga probabilitas PAD lebih kecil dari nilai *alpha* 5% ($0,0470 < 0,05$) maka disimpulkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang signifikan dan juga berpengaruh positif terhadap OPA yang di tunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,745673.

3. Jenis dan Letak Pemerintahan

Dari hasil estimasi, di dapatkan nilai t-hitung sebesar -0,821555 dan jika dilihat dari besarnya nilai probabilitas JENIS DAN LETAK yaitu 0,4148 sehingga probabilitas JENIS DAN LETAK lebih besar dari nilai α 5% ($0,4148 < 0,05$) maka disimpulkan bahwa variabel JENIS DAN LETAK memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga berpengaruh negatif terhadap OPA yang di tunjukkan oleh koefisien regresi sebesar -0,494863.

Pembahasan

1. Pengaruh DAU terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran dengan nilai t-hitung sebesar 8,520295 dan besarnya nilai probabilitas DAU sebesar 0,0000 ($0,0000 < 0,05$).

Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan variabel Dana Alokasi Umum maka Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran akan naik. Oleh karena itu besar kecilnya DAU dapat mempengaruhi terjadinya perilaku oportunistik penyusun anggaran. DAU ini sebenarnya adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

2. Pengaruh PAD terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran dengan nilai t-hitung sebesar 2,030929 dan jika dilihat dari besarnya nilai probabilitas PAD yaitu 0,0470 sehingga probabilitas PAD lebih kecil dari nilai α 5% ($0,0470 < 0,05$) Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah maka Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran akan naik. Pembuktian secara empiris ini bahwa upaya pihak berwenang dalam melakukan perilaku oportunistik mempengaruhi keputusan alokasi anggaran belanja di APBD untuk memenuhi kepentingan pribadinya maupun secara berkelompok. Oleh karena itu perubahan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran tidak dapat ditolak, dimana bahwa PAD merupakan jalan bagi pihak berwenang untuk melakukan "*Political Corruption*" dalam kerangka regulasi yang sah (*legal corruption*) dapat dibuktikan ketika perubahan atau kenaikan anggaran/ target PAD digunakan sebagai dasar untuk melakukan alokasi tambahan belanja.

Pendapatan asli daerah sebenarnya dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Nurlan Darise, 2006:43).

3. Pengaruh Jenis dan Letak Pemerintahan terhadap Perilaku Oportunistik

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di ketahui bahwa Jenis dan Letak Pemerintahan berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada perilaku Opportunistik Penyusun Anggaran dengan nilai t-hitung sebesar -0,821555 dan jika dilihat dari besarnya nilai probabilitas jenis dan letak yaitu 0,4148 sehingga probabilitas jenis dan letak lebih besar dari nilai α 5% ($0,4148 < 0,05$) maka disimpulkan bahwa variabel jenis dan letak memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga berpengaruh negatif terhadap OPA yang di tunjukkan oleh koefisien regresi

sebesar -0,494863. Hipotesis 4 (H3) menunjukkan bahwa variabel Jenis dan Letak Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa variabel Jenis dan Letak Pemerintahan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Oleh karena itu perilaku oportunistik penyusun anggaran dapat dilakukan tidak tergantung pada status suatu daerah, baik kabupaten maupun kota.

Jenis dan Letak Pemerintahan dapat di samakan sebagai status daerah, dimana pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan informasi penggunaan anggaran dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan antar daerah. Secara teori perbedaan ini dapat berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula (Abdullah, 2004). Kontrol sosial pada penduduk kota cenderung lebih kuat, sehingga Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai Kota akan cenderung mematuhi standar anggaran. Namun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kota kendari dan kota baubau masuk dalam daerah yang melakukan tindakan korupsi bersama dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara. Seyogyanya Kota Kendari dan kota baubau mampu menjadi contoh ataupun panutan bagi kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sultra dalam hal penanganan perilaku oportunistik anggaran jika dilihat dari sisi statusnya sebagai kota yang memiliki sumber daya yang jauh lebih baik dari kabupaten.

Pengaruh jenis dan letak pemerintah daerah dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa intensitas perilaku oportunistik penyusun anggaran tidak berkaitan dengan status daerah sebagai kota atau kabupaten. Pandangan bahwa perilaku oportunistik penyusun anggaran di tingkat Kabupaten lebih besar dari pada di tingkat Kotamadya bersumber dari anggapan bahwa *social control* dari stakeholders di luar pemerintahan terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan perilaku anggota legislatif tidak terbukti.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara. kenaikan variabel Dana Alokasi Umum maka Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran akan naik. Oleh karena itu besar kecilnya DAU dapat mempengaruhi terjadinya perilaku oportunistik penyusun anggaran.
2. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah maka Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran akan naik. Pembuktian secara empiris ini bahwa upaya pihak berwenang dalam melakukan perilaku oportunistik mempengaruhi keputusan alokasi anggaran belanja di APBD untuk memenuhi kepentingan pribadinya maupun secara berkelompok.
3. Variabel jenis dan letak pemerintahan berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. perilaku oportunistik penyusun anggaran dapat dilakukan tidak tergantung pada status suatu daerah, baik kabupaten maupun kota..

Saran

1. Pemerintah daerah hendaknya lebih meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dengan mengutamakan alokasi belanja sesuai kebutuhan masyarakat, transparansi anggaran serta menerapkan pengawasan mulai dari proses perencanaan anggaran. Dibutuhkan pula kebijakan penggunaan dana alokasi umum sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.
2. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan semua daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

3. Berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,8952, menunjukkan bahwa masih terdapat 10,48 % pengaruh variabel lain yang mampu menjelaskan variasi variabel perilaku oportunistik penyusun anggaran, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor lain yang berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.
4. Aspek metodologi pada penelitian ini belum mampu mengungkapkan sepenuhnya beberapa persoalan yang mungkin penting untuk menggambarkan perilaku penyusun anggaran, sehingga perlu dikembangkan suatu daftar pertanyaan lengkap (kuisisioner) yang dapat mengukur persepsi pihak - pihak yang terlibat pada penyusunan anggaran.
5. Penelitian selanjutnya dapat memperbaiki pengukuran nilai OPA dengan lebih fokus pada sektor yang memiliki belanja langsung dengan nilai yang besar, mengingat kecenderungan OPA terjadi pada belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Ringkasan Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Abdullah, S. dan Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang 23-26 Agustus.
- Bartolini, D., and Santolini, R. 2007. Fiscal Rules and The Opportunistic Behaviour of The Incumbent Politician: Evidence From Italian Municipalities. *Working Paper*. Institute of Local Public Finance February 2007.
- Eisenhardt, K.M. 1989. Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review* 14 (1): 57-74.
- Hagen, J.V. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social Review* 33(3): 263-284.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3. No. 4. pp. 305-360.
- Jumaidi, L.T. 2014. Perilaku Legislatif dalam Praktik Penganggaran dengan Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 17* Mataram Lombok 24-27 September 2014.
- Latifah, N.P. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik?. *Fokus Ekonomi* Vol. 5 No. 2 Desember 2010: 85 – 94.
- Lupia, A. and Mc Cubbins, M. 2000. Representation or abdication? How citizens use institution to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291-307.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maryono, R. 2013. Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *E-Jurnal UNP*.
- Mauro, P. 1998. Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics* 69: 263-279.

- Oktriniatmaja, R. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara. *E-Journal Universitas Sebelas Maret*.
- Ragunan dan, M. Ramgulum, N and Ragunan dan, K.2012. Examining the behavioural aspect of budgeting with particular emphasis on public sector/ service budgets. *International Journal of Business and Social Science* 3(14).
- Sujaie, A.F.2013. Oportunisme Perumus Kebijakan Anggaran dalam Penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013: Fenomena dalam Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos. *E-Journal UGM*.
- Sularso, H., Restianto, Y.E. dan Istiqomah, A.E. 2014. Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* 17 Mataram Lombok 24-27 September 2014.
- Suryarini, T.2012. Perilaku Oportunistik Legialtaif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2 No. 1 April 2012.
- Tanzi, V. and Davoodi, H.2002. Corruption, public investment, and growth, *Governance, Corruption, & Economic Performance*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Yusuf Jaya Saputra, 2019. Pengaruh DAU, PAD, SILPA, Jenis Dan Letak Pemerintahan Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara.